

BAB II

KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS PESANTREN

A. Konsep Umum Kurikulum Muatan Lokal

1. Pengertian Kurikulum Muatan Lokal

Sebelumnya membahas kurikulum muatan lokal, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian kurikulum. Sebagaimana diketahui, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *curriculum* yang memiliki arti *a running course or race course, especially a chariot* maksud semua itu adalah *to run* atau berlari.¹ Pada perkembangan selanjutnya istilah tersebut digunakan untuk sejumlah *courses* atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah, atau sejumlah materi pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan.

Menurut pemahaman baru, kurikulum diartikan sebagai segala kegiatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk disajikan kepada peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan (instruksional, kurikuler dan institutional). Pengertian kurikulum menurut pandangan para ahli pendidikan modern adalah berupa *pengalaman belajar*, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Pengertian tersebut berarti memiliki cakupan luas sebagai seluruh kegiatan peserta didik yang berada di bawah tanggung jawab dan bimbingan lembaga atau madrasah. Pengertian tersebut juga menggambarkan segala aktivitas yang sekiranya memiliki efek bagi pengembangan peserta didik dimasukkan ke dalam kurikulum.²

Jadi, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³

¹S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 9.

²Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam, Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2003), hlm. 60.

³ Bambang Soehendro, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Badan Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: BSNP,

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.⁴

Mengingat kurikulum muatan lokal merupakan bagian dari kurikulum nasional, maka masuknya muatan lokal tidak berarti mengubah kurikulum yang sudah ada. Artinya, ditinjau dari bidang studi yang telah ada dalam kurikulum nasional, tetap digunakan rujukan dalam memasukkan bahan pengajaran muatan lokal.

2. Fungsi dan Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Salah satu ciri kurikulum pendidikan dasar 9 tahun adalah adanya mata pelajaran muatan lokal, yang berfungsi memberi peluang untuk mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap perlu oleh madrasah dan daerah yang bersangkutan.⁵

Menurut Oemar Hamalik,⁶ fungsi kurikulum muatan lokal ialah sebagai berikut:

- a. Fungsi Penyesuaian. Madrasah merupakan komponen dalam masyarakat, sebab madrasah berada di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program madrasah harus disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan daerah dan masyarakat.
- b. Fungsi Integrasi. Peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang

2006: hlm. 3; lihat juga: Depdiknas, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Depdiknas, 2006), hlm. 1.

⁴Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, *Model Pengembangan Mata Pelajaran Muatan Lokal SD/MI/SDLB - SMP/MTS/SMPLB - SMA/MA/SMALB/SMK*, (Jakarta, Depdiknas, 2007), hlm. 4.

⁵ Mohlm. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 145.

⁶Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung, Remaja Rosdakarya), hlm. 266-267

berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakatnya.

- c. Fungsi Perbedaan. Peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang bersifat luwes, yaitu program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik, lingkungan dan daerahnya.

Tujuan muatan lokal sebagaimana dijelaskan dalam Depdiknas,⁷ yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Jadi, tujuan muatan lokal sifatnya memperkaya, memperluas tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum nasional, serta tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Ruang Lingkup Kurikulum Muatan Lokal

- a. Seseuai Keadaan dan Kebutuhan Daerah

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.⁸

⁷Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 2.

⁸Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 4.

Kebutuhan daerah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Riwayuat,⁹ misalnya kebutuhan untuk:

- 1) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah
- 3) Meningkatkan penguasaan bahasa asing untuk keperluan sehari-hari, dan menunjang pemberdayaan individu dalam melakukan belajar lebih lanjut (belajar sepanjang hayat).

b. Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing (Inggris, Mandarin, Arab dll), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.¹⁰

4. Tinjauan Struktur Kurikulum Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, dicantumkan bahwa struktur kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah memberi alokasi waktu untuk muatan lokal itu dua jam pelajaran dalam satu minggu.¹¹

Posisi muatan lokal dalam KTSP adalah sebagaimana dijelaskan dalam BSNP, bahwa muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasaan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Selain itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.¹²

⁹Riwayuat, 2007, *Pengembangan Muatan Lokal*, <http://islam-intelek-pendidikan.blogspot.com/2007/11/pengembangan-muatan-lokal.html> Riwayuat (2007: 4)

¹⁰Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 4.

¹¹Jajang Badruzaman, *KTSP dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*, Desember 6, 2007, <http://lenterapena.wordpress.com/2007/12/06>

¹²Bambang Soehendro, *op.cit.*, hlm. 10.

B. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren

Madrasah memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan waktu untuk mengajar, membimbing, dan mengevaluasi hasil belajar siswa, maka alternatif yang sangat memadai untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah pengembangan *madrasah berbasis pesantren*. Akan tetapi, mengenai basis pesantren yang akan dikembangkan tentu dapat beraneka ragam, mulai dari jenis pesantren yang berorientasi tradisional hingga jenis pesantren yang orientasi modern.

1. Strategi Pengembangan Madrasah Berbasis Pesantren

Menurut Imam Tolkhah,¹³ ada dua strategi yang dapat dikembangkan tentang madrasah/sekolah berbasis pesantren, yakni pengembangan PAI berbasis pesantren secara penuh dan pengembangan PAI berbasis pesantren secara parsial:

a. Pengembangan PAI berbasis pesantren secara penuh pada madrasah/sekolah

Pengembangan PAI di madrasah berbasis pesantren secara penuh dapat dilakukan dengan dua model:

- 1) Pesantren mengembangkan madrasah diniyah sekaligus sekolah. Bahkan pesantren mendirikan sekolah/madrasah terkesan meningkat. Bagi sebagian pesantren, pendirian madrasah tersebut memang diperuntukan para santri yang mondok di pesantren. Melalui cara ini diharapkan bahwa para santri tidak saja hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang setara dengan para siswa di sekolah lain.¹⁴
- 2) Pesantren dimunculkan bersamaan atau setelah pengembangan sekolah/madrasah

Ada beberapa prasyarat yang diperlukan untuk mengembangkan budaya pesantren secara penuh pada madrasah dengan *pertama*, di samping adanya fasilitas madrasah yang

¹³Imam Tholkhah, *Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran PAI*, (Jakarta: Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama Ditpais, Depag RI.).

¹⁴*Ibid.*, hlm. 66.

memadai, perlu memiliki sarana atau fasilitas pesantren seperti masjid, kitab-kitab agama, perpustakaan, laboratorium, sarana olah raga, seni dan teknologi informasi. *Kedua*, diperlukan seorang kepala madrasah dan para siswa, guru, tutor serta kyai yang tinggal dalam satu kompleks asrama. *Ketiga*, diperlukan kesiapan siswa untuk belajar secara total (menjadi santri).¹⁵ *Keempat*, diperlukan seorang kepala madrasah yang berkualitas (kemampuan manajerial serta dedikasi yang tinggi). *Kelima*, diperlukan sejumlah guru, tutor dan tenaga administrasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pendidikan.¹⁶

- b. Pengembangan PAI berbasis pesantren secara parsial pada sekolah/madrasah

Pengembangan pendidikan agama Islam di madrasah berbasis pesantren secara parsial pada dasarnya menempatkan sebagian dari nuansa pesantren (yang mencakup keberadaan fisik dan nonfisik) dalam sistem pendidikan sekolah/madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa, sistem pendidikan madrasah mengadopsi sebagian dari unsur atau kultur pesantren. Berikut ini contoh pembelajaran PAI berbasis pesantren secara parsial pada madrasah:

1. Pengembangan Pesantren Kilat
2. *Boarding school*.
3. Pengembangan Simbol Agama.¹⁷

2. Ruang Lingkup Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren

Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu: tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi.¹⁸ Kelima

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸ Akhmad Sudrajat, *Komponen-Komponen Kurikulum*, <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/komponen-komponen-kurikulum>, hlm. 11.

komponen tersebut di atas, menurut Akhmad Sudrajat¹⁹ memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.

Oleh karena itu ruang lingkup kurikulum muatan lokal berbasis pesantren juga meliputi lima komponen tersebut, yaitu: Tujuan kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan tujuan satuan pendidikan (madrasah bersangkutan), institusional, maupun instruksional. , apabila madrasah yang dikembangkan berciri khas pesantren salaf, maka tujuannya juga berorientasi pada pesantren salaf. Begitu halnya jika madrasah yang dikembangkan mengikuti pesantren modern, maka ciri khas muatan lokalnya bertujuan ke arah tersebut.

Materi kurikulum muatan lokal berbasis pesantren bisa mengadopsi kurikulum pesantren *salafiyah* (tradisional) maupun kurikulum pesantren *khalafiyah* (modern). Penentuan dan pengambilan mata pelajarannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa.

Strategi pembelajaran muatan lokal adalah sama halnya dengan kurikulum Nasional dan Depag, namun lebih banyak berupa ceramah, praktek, menemukan/mengalami sendiri (*inquiry*), pembiasaan dan teladan (*modelling*).

3. Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren

Ada dua pola pengembangan mata pelajaran muatan lokal dalam rangka menghadapi pelaksanaan KTSP. Pola tersebut adalah:

a. Pengembangan Muatan Lokal Sesuai Kondisi Madrasah

Langkah pengembangan mata pelajaran muatan lokal tersebut sesuai dengan penjelasan oleh Tim BMPS yaitu:

- 1) Analisis mata pelajaran muatan lokal yang ada di madrasah. Apakah masih layak dan relevan mata pelajaran muatan lokal diterapkan di madrasah?
- 2) Bila mata pelajaran muatan lokal yang diterapkan di madrasah tersebut masih layak digunakan maka kegiatan berikutnya adalah merubah mata pelajaran muatan lokal tersebut ke dalam SK dan KD

¹⁹*Ibid.*

- 3) Bila mata pelajaran muatan lokal yang ada tidak layak lagi untuk diterapkan, maka madrasah bisa menggunakan mata pelajaran muatan lokal dari madrasah lain atau tetap menggunakan mata pelajaran muatan lokal yang ditawarkan oleh Dinas atau mengembangkan muatan lokal yang lebih sesuai.

Selain melalui langkah-langkah di atas, untuk menerapkan suatu mata pelajaran muatan lokal perlu mempertimbangkan kebutuhan madrasah dan mengikuti madrasah lain atau Dinas setempat.

b. Pengembangan Muatan Lokal dalam KTSP

Langkah-langkah pengembangan mata pelajaran muatan lokal yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah
- 2) Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal
- 3) Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal
- 4) Menentukan mata pelajaran muatan lokal
- 5) Mengembangkan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar serta silabus, dengan mengacu pada Standar Isi yang ditetapkan BSNP.²⁰

Pihak yang terlibat dalam pengembangan ialah pihak madrasah dan komite madrasah, yang mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan program muatan lokal. Bila dirasa tidak mempunyai SDM dalam mengembangkan, madrasah dan komite madrasah dapat bekerjasama dengan unsur-unsur Depdiknas seperti Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi dan instansi/lembaga di luar Depdiknas, misalnya pemerintah Daerah/Bapeda, Dinas Departemen lain terkait, dunia usaha/industri, dan tokoh masyarakat.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 5

²¹*Ibid.*, hlm. 6.

C. Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren

Implementasi menurut Tim Penyusun Kamus PPPB²² mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi pada pengertian lain berarti suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.²³

Mengacu pada pengertian implementasi kurikulum di atas, maka implementasi kurikulum muatan lokal berbasis pesantren berarti suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum berbasis pesantren dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga akan terjadi perubahan-perubahan pada peserta didik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, sebagai hasil proses interaksi antara fasilitator sebagai pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.

Implementasi kurikulum muatan lokal berbasis pesantren pada kenyataannya mencakup tiga kegiatan pokok; yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Persiapan/perencanaan, di dalamnya mencakup perencanaan program tahunan, program semester, program modul (pokok bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, program bimbingan dan konseling, pengembangan silabus, serta penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Salah satu aspek penting dalam perencanaan adalah pengembangan silabus. Pengertian silabus ialah sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi, atau materi pelajaran.

Sebagai salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisikan garis-garis besar materi pembelajaran, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus antara lain; (1) Ilmiah, silabus harus benar dan dapat

²²Tim Penyusun Kamus PPPB Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka.Tim Penyusun Kamus PPPB, 1996), hlm. 374.

²³ Ecols Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 43.

dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan selayaknya melibatkan pakar atau mengacu pada pakar yang ahli di bidangnya, agar materi yang disajikan dalam silabus bersifat valid dan memenuhi syarat ilmiah; (2) Relevan, penyajian materi dalam silabus sesuai atau terkait dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional dan sepiritual peserta didik; (3) Sistematis, silabus harus sistematis atau saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi; (4) Konsisten, silabus mengandung adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat, laras) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian (evaluasi); (5) Memadai, silabus harus memadai, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem evaluasi yang menunjang pencapaian kompetensi dasar; (6) Aktual, dan Kontekstual, hendaknya silabus yang mencakup indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan sistem penilaian senantiasa memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi; (7) Fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi; (8) Menyeluruh, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi.²⁴

2. Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal. Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren yang berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran sebagai penerapan langsung oleh pendidik dalam proses interaksi di kelas dengan peserta didik.

Pembelajaran mengandung pengertian sebagai perubahan dalam diri seorang, baik perubahan yang ditunjukkan dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang diakibatkan dari belajar seseorang.

²⁴Masnur Muslich, *KTSP; Dasar Pemahaman dan Pengembangan Pedoman bagi Pengelola Lembaga Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dewan Sekolah, dan Guru*, Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 25- 26.

3. Evaluasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren, yaitu sebagai kegiatan untuk mengetahui tercapai tidaknya kompetensi dasar yang telah ditetapkan, juga sebagai upaya sistematis yang dikembangkan oleh suatu institusi pendidikan yang menjamin tercapainya kualitas proses pembelajaran.

Evaluasi arti umumnya adalah penilaian. Evaluasi adalah pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Oemar Hamalik²⁵ evaluasi mengandung tiga aspek utama; (1) Pertimbangan (*judgment*); (2) Deskripsi obyek penilaian; (3) Kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa pertimbangan sebagai aspek pertama evaluasi adalah pangkal dalam membuat keputusan. Membuat keputusan berarti menentukan drajat tertentu yang berkenaan dengan hasil evaluasi. Pertimbangan membutuhkan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipercaya. Jika keputusan yang dibuat tanpa suatu proses pertimbangan yang mantap, maka dapat mengakibatkan lemahnya hasil keputusan.

Menurut perspektif Arikunto,²⁶ evaluasi pembelajaran mengandung dua aspek yang pada mulanya berawal dari pemahaman tentang prestasi belajar, baru dikembangkan dan diartikan sebagai berikut; *pertama*, evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan sudah dicapai; *kedua*, evaluasi dipahami lebih luas, yaitu bukan hanya sekedar mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Pemahaman tersebut mengandung maksud bahwa evaluasi pembelajaran adalah upaya mengetahui kualitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Pada prakteknya evaluasi atau penilaian yang dilakukan adalah Penilaian Berbasis Kelas (PBK) atau penilaian yang dilaksanakan secara

²⁵Oemar Hamalik, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 3.

terpadu dalam kegiatan pembelajaran yaitu suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur dari peserta didik.²⁷

Fungsi penilaian kelas, berdasarkan buku pedoman Depdiknas²⁸ mengenai Sistem Penilaian Kelas, setidaknya meliputi: 1) fungsi motivasi, 2) fungsi belajar tuntas, 3) fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran, dan 4) fungsi umpan balik.

Penilaian tes tertulis merupakan tes soal dan jawaban yang diberikan pada peserta didik dalam bentuk tulisan. Saat menjawab soal, peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk yang lain, seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan sebagainya. Bentuk soal tes tertulis meliputi: pilihan ganda, dua pilihan jawaban, menjodohkan, isian, jawaban singkat, dan uraian.²⁹

Penilaian portofolio, merupakan karya (hasil kerja) peserta didik pada periode tertentu. Kumpulan karya ini menunjukkan taraf kompetensi yang dicapai oleh seorang peserta didik. Portofolio juga dapat digunakan untuk menilai perkembangan penilaian peserta didik. bentuk portofolio setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga: portofolio kerja, dokumentasi, dan penampilan.³⁰

Penilaian hasil kerja (*product*), merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktek atau kualitas estetik dari sesuatu yang peserta didik produksi. Misalnya: menggambar, menulis, kerajinan, dan lain-lain.

Penilaian penugasan (proyek) merupakan penilaian untuk mendapatkan gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara kontekstual, mengenai kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Penilaian terhadap

²⁷Masnur Muslich, *op.cit.*, hlm. 91.

²⁸Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁹Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 10.

³⁰*Ibid.*, hlm. 83.

sesuatu tugas yang mengandung investigasi harus selesai dalam waktu tertentu. Investigasi dalam penugasan memuat tahapan; perencanaan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian data.

Penilaian kinerja (*performance*) adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik sebagaimana yang terjadi. Penilaian ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi dalam memainkan alat musik, aktivitas olah raga, menggunakan laboratorium, mengoperasikan suatu alat.

Penilaian sikap, yaitu perilaku dan keyakinan peserta didik terhadap suatu obyek, fenomena dan masalah. Penilaian observasi perilaku, misalnya tentang kerjasama, inisiatif, perhatian. Kemudian pertanyaan langsung, misalnya tanggapan terhadap tata tertib madrasah yang baru. Selain itu bisa juga berupa laporan pribadi, misalnya menulis pandangan tentang kerusuhan antar etnis.

Berkaitan dengan landasan teori di atas, maka apabila masyarakat setempat, dalam hal ini pengurus yayasan beserta masyarakat, menghendaki madrasah yang memiliki kekhasan agama, maka hak pendirian telah dijamin dalam pasal 55 butir 1) UU Sisdiknas no. 20/2003. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Misyanto³¹ di atas, bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan pengembangan dari manajemen berbasis madrasah (*school based management*) yang memberikan otonomi kepada madrasah, yakni kepala madrasah yang mengelola pendidikan dan pembelajarannya di madrasah.

Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah berbasis pesantren sangat perlu diperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan madrasah tersebut serta *pendidikan berbasis masyarakat* sebagai acuannya. Jika kepentingan masyarakat untuk mendirikan madrasah berciri khas pesantren, maka untuk menyusun kurikulumnya perlu diperhatikan mengenai tujuan yang hendak

³¹Misyanto, *op.cit.*, hlm. 3.

dicapai. Apakah akan menganut sistem pesantren *salafiyah* atau *khalafiyah*, hal itu bergantung dari kepentingan penyelenggara madrasah bersangkutan.

Kurikulum pesantren yang dijadikan sebagai ciri khas dan keunggulan madrasah dapat diakomodir melalui bentuk kurikulum muatan lokal madrasah berbasis pesantren. Selain memberlakukan kurikulum dari Diknas dan Depag, maka kurikulum pesantren salaf maupun modern perlu dimasukkan dalam kurikulum, baik berupa intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokulikuler.

Berdasarkan pada deskripsi teori di atas, maka dapat diketahui lebih jelas landasan, tujuan, fungsi serta maksud dari konsep kurikulum madrasah maupun kurikulum muatan lokal berbasis pesantren yang dimaksud dalam landasan teori ini. Diharapkan dapat memperjelas arah penelitian dan mempermudah analisis data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang telah diuraikan di atas. Melalui deskripsi landasan teori yang mapan, tentunya akan didapat ketajaman dalam menganalisa hasil temuan lapangan sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini.